



WALIKOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan 2011-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22);

22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Balikpapan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2016.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
9. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dokumen Perencanaan SKPD dituangkan dalam bentuk:

- a. Renstra SKPD (5 Tahun) ditanda tangani oleh Kepala SKPD;
- b. Indikator Kinerja Utama (5 Tahun) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD;
- c. Penetapan Kinerja (setiap tahun) dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diketahui Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Pebruari 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,



SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KOTA
 BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 -2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi 2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar 3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah 4. Persentase angka kelulusan ➤ SD ➤ SMP Sederajat ➤ SLTA Sederajat 5. Angka Putus Sekolah 6. Jumlah sekolah standar nasional 7. Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar: ➤ SD/MI Sederajat ➤ SMP/MTs Sederajat ➤ SLTA/MA sederajat 2. Angka Partisipasi Murni: ➤ SD/MI Sederajat ➤ SMP/MTs Sederajat ➤ SLTA/MA sederajat 3. Jumlah Perpustakaan: ➤ Formal ➤ Informal 4. Tingkat literasi usia > 15 tahun 5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6. APK Pendidikan Usia Dini 7. Jumlah kelompok belajar: ➤ Paket A ➤ Paket B ➤ Paket C 8. Rasio Tingkat Pendidikan dasar yang ditamatkan Siswa Gakin 9. Angka putus sekolah siswa Gakin	Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		10. Persentase masyarakat Gakin yang putus sekolah dilayani SKB	Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 4. Angka beban tanggungan (Dependency ratio) 5. Angka Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja 6. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan 7. Persentase lembaga K3 di perusahaan 8. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 9. Persentase penyerapan tenaga kerja 10. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek 11. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial lainnya 	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
4.	Meningkatnya kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UHH 2. AKI/AKB: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka kematian Ibu Nifas ➤ Angka Kematian Balita ➤ Angka kematian Neonatal ➤ Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 3. Persentase ASI eksklusif 4. Persentase kunjungan ibu hamil 5. Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 6. Persentase pelayanan ibu nifas 	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		7. Persentase neonatal dengan komplikasi yang ditangani 8. Persentase kunjungan bayi 9. Persentase desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> 10. Persentase pelayanan anak balita 11. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 12. Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I 2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan 3. Puskesmas perawatan mampu PONEC 4. Presentase produksi sediaan farmasi dan makanan yang memenuhi standar mutu dan distribusi 5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat) 6. Jumlah fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja (PKPR) 7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia 8. Jumlah jaminan kesehatan 9. Jumlah kelurahan mengalami KLB 10. Persentase pelayanan dasar masyarakat miskin 11. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 12. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan Tk I 13. Jumlah Kelurahan siaga	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah organisasi kepemudaan aktif 2. Jumlah anggota organisasi kepemudaan 3. Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olah raga dan olah raga tradisional	1. Jumlah organisasi Cabang olah raga	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		2. Jumlah prestasi olah raga: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Internasional ➤ Tingkat Nasional ➤ Tingkat Regional 3. Jumlah event : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Kota ➤ Tingkat Provinsi/Regional ➤ Tingkat Nasional ➤ Tingkat Internasional 4. Jumlah klub olah raga tradisional 5. Jumlah event olahraga tradisional : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Kota ➤ Tingkat Propinsi/Regional ➤ Tingkat Nasional ➤ Tingkat Internasional 6. Jumlah atlet yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Internasional ➤ Tingkat Nasional ➤ Tingkat Regional 2. Jumlah TKA/TPA 3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan 4. Jumlah pendaftar haji 5. Persentase kenaikan zakat, infaq dan sedekah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
9.	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatarbelakang Agama 2. Jumlah lembaga yang menangani kerukunan keagamaan 3. Jumlah kegiatan lembaga yang menangani kerukunan keagamaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	1. Jumlah Koperasi Aktif (%) 2. Jumlah UMKM Produktif 3. Jumlah Produk Unggulan 4. Persentase produk bersertifikat	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
11.	Meningkatkan Permodalan	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/KSP (Koperasi Simpan Pinjam) 2. Jumlah BPR 3. % Kredit Usaha Kecil Menengah Nilai investasi 4. Angka inflasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Padi ➤ Jagung ➤ Pepaya ➤ Pisang ➤ Nenas ➤ Salak ➤ Sayuran Dataran Rendah 2. Produksi hasil ternak: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daging Sapi ➤ Daging Ayam ➤ Telur Ayam 3. Produksi Kehutanan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Karet ➤ Kelapa 4. Produksi Budidaya Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi Budidaya Rumput Laut ➤ Produksi Perikanan Tangkap 5. Produksi perikanan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tongkol ➤ Layang ➤ Bawal ➤ Cakalang ➤ Tengiri ➤ Tembang ➤ Kerapu ➤ Kembang ➤ Selar ➤ Cumi-Cumi 	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin	
14.	Terwujudnya ketahanan pangan	1. Cakupan cadangan pangan: 2. Jumlah penganekaragaman pangan	Bagian Perekonomian
15.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah kelompok siskamling aktif 3. Rasio petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk 4. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		5. Jumlah organisasi kedaerahan/Paguyuban dan Forum Komunikasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum 6. Angka pelanggaran Perda 7. Jumlah kegiatan sosialisasi 8. Jumlah kelurahan sadar hukum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Hukum
16.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Angka partisipasi pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
17.	Meningkatnya peran serta, pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah panti/organisasi sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah Jumlah Masyarakat PMKS 2. Peningkatan partisipasi Sosial Lembaga Masyarakat 3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar 4. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 5. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
18.	Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Angka Penyandang Masalah Sosial 2. Persentase angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau sejenisnya	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
19.	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	1. Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana 2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat 3. Cakupan luas pelayanan bencana kebakaran 4. Adanya protap penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		5. Jumlah Kegiatan Simulasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
20.	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/ relawan dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 2. Jumlah Taruna Siaga Bencana	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
21.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	1. Capaian IKM Unit Pelayanan Publik 2. Jumlah Perizinan yang diterbitkan 3. Cakupan kepemilikan kartu Tanda Penduduk 4. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 5. Jumlah investor/investasi 6. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima 7. Persentase keluhan/aduan terhadap pelayanan 8. Persentase penyelesaian permohonan perijinan	Bagian Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bagian Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
22.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1. Rasio Ketersediaan daya listrik 2. Persentase sambungan listrik	Bagian Perekonomian
23.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri 2. Persentase Pertumbuhan Industri 3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 4. Angka PDRB 5. Jumlah Sarana Perdagangan 6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan 7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pasar Dinas Pasar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
24.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Unit Usaha 2. Persentase Penyerapan tenaga kerja 3. Jumlah kesempatan kerja 4. Angka Pengangguran 5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja 	<p>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</p>
25.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Sumber Pendapatan Daerah lainnya 	Dinas Pendapatan Daerah
26.	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Jumlah SOP Pelayanan 3. Jumlah instansi pelayanan publik yang melaksanakan SOP 4. Jumlah instansi yang pelayanan publik yang membuka nomor pengaduan 5. Jumlah instansi yang mempunyai pola pengelolaan pengaduan 	Bagian Organisasi
27.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD 2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan Renstra 3. Opini terhadap laporan keuangan daerah 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD 5. Jumlah aplikasi/SIM yang ada di seluruh SKPD 6. Pemenuhan kebutuhan PNS 7. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 8. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional 9. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG 	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		<p>10. Tingkat Sumberdaya (Diklat) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diklat Pim II ➤ Diklat Pim III ➤ Diklat Pim IV ➤ Diklat T/F ➤ Diklat LPJ <p>11. Jumlah PNS yang mengikuti assessment</p> <p>12. Persentase tumpang tindih tupoksi antar SKPD</p> <p>13. Jumlah SKPD yang telah mempunyai uraian jabatan</p> <p>14. Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan</p> <p>15. Persentase SKPD yang telah memiliki SOP</p> <p>16. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>17. Jumlah urusan yang didelegasikan kepada Kecamatan</p> <p>18. Jumlah urusan yang didelegasikan kepada Kelurahan</p> <p>19. Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP</p> <p>20. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal</p> <p>21. Jumlah SKPD yang sudah dilakukan diagnostic assessment SPIP (DA SPIP)</p> <p>22. Persentase PNS yang dijatuhi hukuman disiplin</p>	<p>Kapasitas Aparatur</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Umum dan Perlengkapan</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Inspektorat</p> <p>Inspektorat</p> <p>Inspektorat</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah</p>
28.	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	<p>1. Jumlah uji KIR angkutan umum</p> <p>2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS</p> <p>3. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)</p> <p>4. Panjang jalan kota yang di bangun</p> <p>5. Panjang jalan yang ditingkatkan</p> <p>6. Panjang Jembatan yang dibangun</p> <p>7. Panjang jalan yang dipelihara</p> <p>8. Jumlah Perbaikan Simpang</p>	<p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
33.	Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tidak layak huni 2. Persentase rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni 3. Persentase kawasan permukiman kumuh 	Dinas Tata Kota dan Perumahan
34.	Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (Rusunawa dan Rusunami)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rusunami 2. Jumlah Rusunawa 	Dinas Tata Kota dan Perumahan
35.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. (%) rumah tinggal bersanitasi 	Dinas Pekerjaan Umum
36.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Hukum tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang 	Dinas Tata Kota dan Perumahan
37.	Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah budidaya pesisir 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38.	Terkendalnya pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. (%) bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan 2. (%) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang 3. Jumlah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 4. Jumlah Bangunan Perumahan 5. Luas wilayah hutan lindung 6. Luas wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39.	Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penanganan anak jalanan dan terlantar 2. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial 3. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan 	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		4. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
40.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akseptor aktif 2. Prevalensi Rate 3. Persentase partisipasi Gakin untuk ber-KB 4. Tingkat kelestarian ber KB <ul style="list-style-type: none"> ➢ 10 Tahun ➢ 15 Tahun ➢ 20 Tahun 5. Persentase PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun 6. Persentase anggota bina keluarga balita 7. Persentase penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
41.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi masyarakat 2. Persentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang 3. Jumlah Dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<p>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p>
42.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	1. Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
43.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah 2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki 3. Angka perempuan melek huruf 4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5. Menurunnya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 	<p>Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p>
44.	Meningkatnya kualitas anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah prestasi anak: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat provinsi ➢ Tingkat nasional ➢ Tingkat Internasional 2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK 4. Jumlah anak terlantar 	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		5. Angka Kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur 6. Angka anak jalanan 7. Jumlah fasilitas bermain anak 8. Angka pekerja anak di bawah umur	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
45.	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	1. Luas kawasan hutan 2. Luas rehabilitasi kawasan hutan 3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan 4. Luas konservasi kawasan mangrove 5. Luas hutan kota yang terrehabilitasi dan tidak bermasalah 6. Luas hutan Kota yang sudah dipagar 7. Luas hutan kota 8. (%) terbangunnya Kebun Raya 9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat 10. Rasio ketersediaan area pemakaman 11. Jumlah DAS yang termonitoring 12. Jumlah Rekomendasi untuk izin pengguna air tanah 13. Luasan Penanaman pohon 14. Angka data keanekaragaman hayati 15. Luas lokasi percontohan Keanekaragaman hayati	Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
46.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	1. Cakupan pelayanan kebersihan 2. Volume pengurangan sampah melalui pengolahan sampah 3. Jumlah sarana dan prasarana operasional kebersihan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		4. Luas area TPA 5. Frekuensi Kerja Bakti Massal 6. Jumlah penghargaan bidang kebersihan dan keindahan kota	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman
47.	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup	1. Jumlah sekolah adiwiyata 2. Persentase pengelolaan Gas Buang Industri 3. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik 4. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi 5. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong 6. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal) 7. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah 8. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 9. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu 10. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper) 11. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup 12. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA 13. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat 14. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Badan Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
48.	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	1. Jumlah grup seni dan budaya 2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya 5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 6. Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
49.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Jumlah wisata nusantara 2. Jumlah wisata mancanegara 3. Jumlah destinasi/obyek wisata	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
50.	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	1. Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE